

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA SEBUAH PANDANGAN KONSEPSIONAL

Dede Rosyada

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: doroba57@gmail.com

Abstract

This article was written to provide an overview of the conceptual view of multicultural education in Indonesia. In order to obtain data on the concept of multicultural authors conducted a study of literatures. As we know that Indonesia is a country with ethnic diversity but it aspires to the same goal, that is to the wealthy and prosperous society. Therefore, it becomes important to develop multicultural education, which is an educational process that gives equal opportunities to all children including minorities regardless of their differences in ethnicity, culture and religion, to strengthen the unity and integrity, national identity and the nation's standing in the international world. In this case, the school must design the learning process, preparing curriculum and evaluation design, as well as prepare teachers who have the multicultural perception, attitude and behavior, so that they becomes part of those make a significant contribution to the development of multicultural attitude of the students.

Keywords: multiculturalism, multicultural education, multicultural attitude

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk memberikan gambaran tentang pandangan konseptual tentang pendidikan multikultural di Indonesia. Guna memperoleh data tentang konsep multikultural penulis melakukan kajian kepustakaan. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera. Karena itu, menjadi penting pengembangan pendidikan multikultural, sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional. Dalam hal ini, sekolah harus mendesain proses pembelajaran, mempersiapkan kurikulum dan desain evaluasi, serta mempersiapkan guru yang memiliki persepsi, sikap dan perilaku multikultural, sehingga menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap multikultural para siswanya.

Kata kunci: multikulturalisme, pendidikan multikultural, sikap multikultural.

A. Pendahuluan

Wacana tentang pendidikan multikultural semakin mengemuka seiring dengan terus bergulirnya arus demokratisasi dalam kehidupan bangsa, yang berimplikasi terhadap penguatan *civil society* dan penghormatan terhadap HAM. Demokrasi yang sudah menjadi pilihan bangsa sejak gerakan reformasi pada

akhir abad ke-20 yang baru lalu, tidak sekedar tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, gagasan dan kritik sosial mereka terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut kebutuhan publik, tetapi benar-benar menjadi ruh kehidupan masyarakat dalam

berbangsa dan bernegara ini, membangun persatuan dan kesatuan, membangun kekuatan dalam kemajemukan, serta menghilangkan sekat-sekat kultur, ras, bahasa dan agama demi kepentingan bangsa ke depan, yang dituntut untuk semakin kompetitif dalam menghadapi persaingan global.

Sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majemuk. Amerika, Canada, Australia adalah sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori mulikulturalisme dan pendidikan multikultural, karena mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya, atau kultur nenek moyang tanah asalnya. Dalam sejarahnya, menurut Melani Budiarta, multikulturalisme diawali dengan teori *melting pot* yang sering diwacanakan oleh J. Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya, Hector menekankan penyatuan budaya dan melecehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protendant (WASP)* sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa.¹

Kemudian, ketika komposisi etnik Amerika kian beragam dan budaya mereka kian majemuk, maka teori *melting pot* kemudian dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama *salad bowl* sebagai sebuah teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan *melting pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori *salad bowl* atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar *White Anglo Saxon Protendant (WASP)* diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional. Pada akhirnya,

interaksi kultural antarberbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa, sehingga dikembangkan teori *cultural pluralism*, yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa.²

Dengan berbagai teori di atas, bangsa Amerika berupaya memperkuat bangsanya, membangun kesatuan dan persatuan, mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika. Namun pada dekade 1960-an masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok Amerika Hitam, atau imigran Amerika Latin atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya. Atas dasar itulah, kemudian mereka mengembangkan *multiculturalism*, yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras atau warna kulit. Multikulturalisme pada akhirnya merupakan sebuah konsep akhir untuk membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya dan bahasa, dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut akan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam membesarkan sebuah bangsa, karena mereka akan menjadi besar dengan kebesaran bangsanya, dan mereka akan bangga dengan kebesaran bangsanya itu.

Indonesia sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh Azyumardi Azra, telah menyadari tentang kemajemukan ragam etnik dan budaya masyarakatnya. Indonesia diproklamkan sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera. Akan tetapi, gagasan besar tersebut kemudian tenggelam dalam sejarah dengan politik mono-kulturnya di zaman Soekarno dan Soeharto. Demokrasi terpimpin yang diusung

1 Melani Budiarta, Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural, Sebuah Gambaran Umum, dalam Tsaqafah, Vol. 1, No. 2, 2003, h. 8.

2 Ibid, h. 9.

Soekarno telah mematkan kreativitas-kreativitas lokal daerah yang berbasis etnik dan budaya tertentu. Demikian pula dengan manajemen pemerintahan yang sentralistik zaman Soeharto, sehingga falsafat *Bhinneka Tunggal Ika*, kemudian hanya menjadi slogan tetapi tidak pernah mewujudkan dalam teori ketata negaraan, hubungan sosial maupun pranata sosial lainnya. Ketika simpul-simpul yang mengikat demokratisasi itu dibuka dan dilepas zaman reformasi, maka gagasan multikulturalisme kini mengemuka, dan langsung memasuki wilayah pendidikan, yang seharusnya teori-teori multikulturalismenya itu dirumuskan terlebih dahulu oleh para ahli bidang ilmu-ilmu sosial politik. Dengan demikian, Indonesia tidak akan memiliki pretensi untuk kembali pada teori *melting pot* atau *salad bowl*. Indonesia, sebagaimana dikuatkan oleh para ahli yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan multietnik, justru menjadikan multikulturalisme sebagai *common platform* dalam mendesain pembelajaran yang berbasis *Bhinneka Tunggal Ika*, bahkan nilai-nilai tersebut diupayakan melalui mata pelajaran kewarganegaraan dan didukung pula oleh pendidikan agama.³

B. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural masih diartikan sangat ragam, dan belum ada kesepakatan, apakah pendidikan multikultural tersebut berkonotasi pendidikan tentang keragaman budaya, atau pendidikan untuk membentuk sikap agar menghargai keragaman budaya. Kamanto Sunarto menjelaskan bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat.⁴ Sementara itu, Calarry Sada dengan mengutip tulisan Sleeter dan Grant menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki empat makna (model), yakni: (1) pengajaran tentang

keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural, (2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial, (3) pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat, dan (4) pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan.⁵ Gagasan pendidikan multikultural di Indonesia sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh H.A.R Tilaar adalah pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat.⁶ Sementara Conny R. Semiawan memiliki perspektif tersendiri tentang pendidikan multikultural, bahwa seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi terbaik di bangsa ini.⁷

Apapun definisi yang diberikan para pakar pendidikan adalah fakta bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak etnik, dengan keragaman budaya, agama, ras dan bahasa. Indonesia memiliki falsafah berbeda suku, etnik, bahasa, agama dan budaya, tapi memiliki satu tujuan, yakni terwujudnya bangsa Indonesia yang kuat, kokoh, memiliki identitas yang kuat, dihargai oleh bangsa lain, sehingga tercapai cita-cita ideal dari pendiri bangsa sebagai bangsa yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu, seluruh komponen bangsa tanpa membedakan etnik, ras, agama dan budaya, seluruhnya harus bersatu pada, membangun kekuatan di seluruh sektor, sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri bangsa yang tinggi dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu, mereka harus saling menghargai satu sama lain, menghilangkan sekat-sekat agama dan budaya. Semua itu, sebagaimana Azyumardi Azra tegaskan, bukan sesuatu yang *taken for granted* tetapi harus diupayakan melalui proses pendidikan yang multikulturalistik, yakni pendidikan untuk semua, dan pendidikan yang memberikan perhatian serius terhadap

3 Azyumardi Azra, Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*, dalam *Tsaqafah*, Vol. I, No. 2, 200, h. 19.

4 Kamanto Sunarto, Multicultural Education in Schools, Challenges in its Implementation, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004, h 47.

5 Clarry Sada, Multicultural Education in Kalimantan Barat; an Overview, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004, h. 85.

6 H.A.R. Tilaar, Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam *Transformasi Pendidikan Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2004, hal. 137-138.

7 Conny R. Semiawan, The Challenge of a Multicultural Education in a Pluralistic Society; the Indonesian Case, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004, h. 40.

pengembangan sikap toleran, respek terhadap perbedaan etnik, budaya, dan agama, dan memberikan hak-hak sipil termasuk pada kelompok minoritas.⁸ Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam konteks ini diartikan sebagai sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional.

Implementasi pendidikan multikultural di berbagai negara berbeda-beda. Bila melihat salah satu contoh pendidikan multikultural di Amerika, sebagaimana dikutip oleh Tilaar dari hasil penelitian Banks, implementasi pendidikan multikultural di Amerika meliputi berbagai dimensi, yakni:

1. Dimensi kurikulum, yakni bahwa norma-norma kultur yang akan disampaikan pada siswa diintegrasikan dalam sebuah mata pelajaran, dengan rumusan kompetensi yang jelas.
2. Dimensi ilmu pengetahuan, yakni bahwa perumusan keilmuan dari norma dan aturan kultur yang akan disampaikan itu dirumuskan melalui proses penelitian historis dengan melihat pada pengalaman sejarah tokoh-tokoh yang sangat konsisten dalam memperjuangkan multikulturalisme.
3. Perlakuan pembelajaran yang adil, yakni bahwa perlakuan dalam pembelajaran harus disampaikan secara *fair* dan adil, tanpa membedakan perlakuan terhadap mereka yang berasal dari etnik tertentu, atau dari strata ekonomi tertentu.
4. Pemberdayaan budaya sekolah, yakni bahwa lingkungan sekolah sebagai *hidden curriculum*, harus memberi dukungan terhadap pengembangan dan pembinaan multikulturalisme, baik dalam penyediaan fasilitas belajar, fasilitas ibadah, layanan administrasi maupun berbagai layanan lainnya.⁹

Dengan mengutip pengalaman Amerika, prosedur yang harus ditempuh dalam implementasi pendidikan multikultur di Indonesia adalah, penyiapan kurikulum, yakni menyisipkan berbagai kompetensi yang harus dimiliki siswa tentang multikulturalisme pada mata pelajaran yang relevan, karena multikulturalisme baru sebuah gerakan dan belum menjadi sebuah ilmu yang komprehensif. Kemudian, diikuti dengan perumusan berbagai materi yang sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai, dan diikuti dengan rumusan proses pembelajaran yang lebih memberikan peluang bagi para siswa untuk pembinaan dan pengembangan sikap, di samping pengetahuan dan keterampilan sosial yang terkait dengan upaya pengembangan sikap multikulturalistik.

Indonesia sendiri belum memiliki pengalaman pendidikan multikultural yang terdesain secara terencana, karena belum ada pengalaman yang dikontrol dalam sebuah penelitian akademik. Akan tetapi, jika mengutip Will Kymlicka, yang mencoba mendeskripsikan *Multicultural Citizenship*, pengalaman di Amerika Utara, maka materi-materi yang seharusnya dihantarkan dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut.

1. Tentang hak-hak individual dan hak-hak kolektif dari setiap anggota masyarakat, yakni setiap individu dari suatu bangsa memiliki hak yang sama untuk terpenuhi seluruh hak-hak asasi kemanusiaannya, seperti hak untuk memeluk sebuah agama, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak atas kesempatan berusaha dan yang sebangsanya. Demikian pula, secara kolektif, walaupun mereka berasal dari kelompok etnik minoritas dan tidak memiliki perwakilan dalam birokrasi dan lembaga legislatif, tapi mereka memiliki hak yang sama dengan kelompok mayoritas untuk menyampaikan aspirasi politiknya, mengembangkan budayanya, dan yang sebagainya.¹⁰
2. Tentang Kebebasan individual dan budaya, yakni bahwa setiap individu

⁸ Azyumardi Azra, Pendidikan Multikultural; Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika, dalam Tsaqafah, Vol. I, No. 2, 2003, h. 20.

⁹ Ibid, h. 138.

¹⁰ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, New York, 2000, h. 34.

- termasuk dari etnik minoritas memiliki kebebasan untuk berkreasi, berkarya, bahkan untuk mengembangkan dan memajukan budayanya. Kelompok etnik mayoritas harus menghargai hak-hak minoritas untuk mengembangkan kreativitas dan budayanya itu.¹¹
3. Tentang keadilan dan hak-hak minoritas, yakni seluruh anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dari negara, dan bahkan mereka juga memiliki hak untuk mengembangkan kultur etniknya, termasuk etnik minoritas yang harus mampu mengelola bahasa, dan berbagai institusi sosialnya, agar tidak hilang dalam budaya kelompok etnik minoritas.¹²
 4. Jaminan minoritas untuk bisa berbicara dan keterwakilan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislatif. Mereka memiliki hak untuk bisa terwakili, tetapi, karena sistem kepartaian, seringkali kemudian ada kelompok-kelompok etnik, budaya dan kepentingan yang tidak terwakili, seperti wanita pekerja yang belum tentu terwakili di parlemen, etnik kecil yang belum tentu terwakili sehingga aspirasi dan suaranya tidak bisa tersampaikan pada proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pembangunan.¹³
 5. Toleransi dan batas-batasnya, yakni bahwa etnik minoritas yang tidak memiliki wakil langsung di lembaga legislatif atau dalam lembaga birokrasi pemerintahan, harus dilindungi oleh etnik atau kelompok mayoritas yang menguasai lembaga-lembaga pemerintahan sebagai lembaga otoritatif untuk pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Akan tetapi, mereka yang berusaha memperhatikan hak-hak minoritas tersebut memiliki berbagai keterbatasan, karena harus memperhatikan etnik atau kelompok mayoritas yang justru mereka wakili. Oleh sebab itu, hak-hak minoritas itu

tetap memperoleh perhatian, namun dalam keterbatasan.¹⁴

Inilah berbagai materi yang senantiasa mereka perhatikan dalam pembinaan bangsanya agar tetap kuat dan terus berkembang, bahkan seluruh budaya termasuk dari etnik minoritas diberi kesempatan untuk membina dan mengembangkannya. Nilai dan norma di atas ditransformasikan dan dikembangkan pada siswa-siswa sekolah melalui pelajaran sejarah, yang di dalamnya juga termasuk *civic education*.

C. Pendidikan Multikultural di Sekolah

Pendidikan multikultural di sekolah menurut James A Banks harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya penyikapan yang adil di antara siswa-siswa yang berbeda agama, ras, etnik dan budayanya, tapi juga harus didukung dengan kurikulum baik kurikulum tertulis maupun terselubung, evaluasi yang integratif dan guru yang memiliki pemahaman, sikap dan tindakan yang produktif dalam memberikan layanan pendidikan multikultural pada para siswanya.¹⁵

Agar dapat memberikan layanan terbaik bagi seluruh *school client*-nya, maka sekolah harus merancang, merencanakan dan mengontrol seluruh elemen sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan multikultural dengan baik. Sekolah harus merencanakan proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap multikultural siswa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang demokratis, menghargai HAM dan keadilan. Sekolah harus mendesain proses pembelajaran, mempersiapkan kurikulum dan desain evaluasi, serta mempersiapkan guru yang memiliki persepsi, sikap dan perilaku multikultur, sehingga menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap multikultur para siswanya.

1. Mencari Format Pendekatan dan Teknik Pembelajaran yang Relevan

Pembelajaran multikultur, baik melalui pendidikan kewarganegeraan ataupun pendidikan agama Islam (atau melalui mata pelajaran lainnya), merupakan proses pembinaan dan pembentukan sikap hidup yang memerlukan

11 Ibid, h. 75.

12 Ibid, h. 12.

13 Ibid, h. 131.

14 Ibid, h. 152.

15 James A. Banks, *Educating Citizens in a Multicultural Society*, Teacher College Press, Columbia University, New York, 1997. h. 78.

landasan pengetahuan serta penanaman nilai dalam diri setiap siswa, agar menjadi warga negara yang religius namun inklusif dan bersikap pluralis tanpa mengorbankan basis keagamaan yang dianutnya. Pendidikan multikultural bukan membina *knowledge skill* pada siswa, yakni program pendidikan tidak diarahkan untuk membentuk tenaga ahli dalam bidang pendidikan multikultur, tetapi mendidik siswa untuk menjadi warga negara yang inklusif, pluralis, menghargai HAM dan keadilan, demokratis tanpa harus mengorbankan pembinaan sikap dan perilaku keberagamaannya. Dengan demikian, orientasi pembelajaran adalah pembinaan sikap dan perilaku hidup siswa, yang tidak akan tercapai hanya dengan rancangan/desain kurikulum yang komprehensif dan sangat apresiatif terhadap usia kronologis siswa, tapi juga pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang relevan untuk membentuk sikap ideal tersebut.

Pembelajaran yang bisa memenuhi rasa keadilan bagi para siswa, menurut James A. Banks adalah strategi-strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi para siswa untuk belajar, bisa mengeksplorasi sumber-sumber informasi, bisa melakukan interpretasi dan membuat kesimpulan-kesimpulan yang mereka perlukan dalam mengembangkan sikap dan perilakunya yang sesuai dengan paradigma masyarakat multikultur yang demokratis, berkeadilan dan menghargai HAM. Oleh sebab itu, dalam membina dan mengembangkan sikap multikultur, guru harus memperbesar pelibatan siswa dalam proses mencari informasi, membahas berbagai persoalan yang terkait dengan informasi-informasi tersebut, serta merefleksikan nilai-nilai yang mereka peroleh dalam proses pembelajarannya itu.¹⁶ Proses pembelajaran harus dikembangkan secara dinamis dan kombinitif antara teknik yang berpusat pada guru dengan teknik-teknik yang melibatkan siswa dalam proses belajar, sehingga sikap afeksinya tumbuh dan berkembang dalam jiwa para siswa. Pengajaran yang berpusat pada guru dan merupakan salah satu bentuk *exposition teaching* (mengajar dengan paparan, atau ceramah) layak untuk digunakan menyampaikan berbagai informasi dalam waktu yang sangat terbatas. Strategi ini paling banyak digunakan oleh guru

pada semua jenjang dan jenis pendidikan, dan akan efektif untuk menyampaikan informasi jika guru adalah seorang orator, serta dibantu berbagai alat bantu, slide, video, film atau lainnya.

Kemudian, *teacher centered teaching* juga mencakup ceramah yang diselingi atau diperkuat dengan tanya jawab. Strategi ini dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman siswa serta sedikit melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Namun guru tetap dominan. Kemudian salah satu model ceramah adalah *socratic teaching*, yakni ceramah atau ekspose yang diawali dengan pertanyaan, lalu ada jawaban, dan terus dikembangkan pertanyaan berbasis jawaban siswa dan seterusnya sehingga terjadi interaksi antara guru dengan siswa. Dan terakhir termasuk dalam kategori *teacher centered teaching* adalah demonstrasi yakni guru atau seseorang mendemonstrasikan informasi di depan kelas, sebagai penguatan visual terhadap informasi yang disampaikan, atau sebagai contoh untuk ditiru oleh siswa melalui latihan-latihan yang harus mereka kembangkan.¹⁷

Sedangkan untuk pembelajaran dengan level pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi, apalagi memasuki ranah afektif untuk mengembangkan sikap menerima terhadap nilai-nilai yang dibawa dalam informasi yang mereka serap, kemudian menunjukkan respon, penanaman nilai dan karakterisasi diri berbasis nilai baru yang mereka terima melalui informasi-informasi keilmuan tersebut, memerlukan berbagai strategi yang variatif berbasis pelibatan siswa dalam proses pembelajarannya. Demikian pula dengan pembelajaran untuk tingkat kompetensi psikomotorik yang mengembangkan kemampuan imitasi serta pembiasaan dan penyesuaian, semuanya memerlukan berbagai strategi yang variatif dan tidak bisa dengan hanya penyampaian serta perintah, tapi pelibatan mereka dalam proses pembelajaran, yang harus dimulai saat guru menyampaikan rumusan-rumusan kompetensi yang akan dicapai, serta berbagai strategi dan perlakuan yang akan dikembangkan untuk mencapai kompetensi-kompetensi tersebut, dan seterusnya dalam proses pembelajaran untuk

16 Ibid, h. 80.

17 Kenneth D. Moore, *Classroom Teaching Skill*, McGraw Hill, New York, 2001, h. 133.

mengembangkan pengalaman mereka sehingga memiliki berbagai kompetensi sesuai yang diharapkan dan telah dirumuskan sejak awal sebelum proses pembelajaran tersebut dimulai.

Begitu banyak wacana tentang strategi pelibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kenneth D. Moore menyebutnya dengan *student centered instruction*, atau pembelajaran berpusat pada siswa, salah satunya adalah diskusi, yang bisa dibentuk dalam berbagai variasi strategi, dari *small group discussion* sampai seminar. Untuk pengembangan afektif sangat efektif dengan menggunakan metode diskusi, karena siswa terlibat benar dengan masalah yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian, bagian dari strategi pelibatan siswa dalam belajar adalah simulasi dan *game*, dengan membuat sebuah situasi yang artifisial, lalu guru menyampaikan pertanyaan, siswa menjawab dan terus mereka membahas jawaban-jawaban dari mereka sendiri, sampai mereka mempunyai kesimpulan tentang masalah yang dibahasnya itu. Simulasi dan *game* berbeda, walaupun prosedurnya sama, melontarkan masalah, membuat situasi artifisial, lalu tanya jawab. Dalam *game* biasanya guru melakukan *scoring* terhadap jawaban siswa, sehingga ada kelompok pemenang dan kelompok yang kalah, sedangkan dalam simulasi tidak lazim *scoring* untuk menentukan juara.¹⁸

Kemudian dari sekian banyak strategi pelibatan siswa dalam belajar, sebagaimana dikatakan Sally Philip dari *The University of Colorado*, umpamanya adalah dengan *active learning* dan terus dikembangkan ke dalam bentuk *collaborative learning*. *Active learning*, atau belajar aktif adalah belajar yang memperbanyak aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber, buku teks, perpustakaan, internet atau sumber-sumber belajar lain, untuk mereka bahas dalam proses pembelajaran dalam kelas, sehingga memperoleh berbagai pengalaman yang tidak saja menambah kompetensi pengetahuan mereka, tapi juga kemampaun analitis, sintesis dan menilai informasi yang relevan untuk dijadikan nilai baru dalam hidupnya, sehingga mereka terima, dijadikan bagian dari nilai yang diadopsi dalam hidup mereka, diimitasi, dibiasakan sampai mereka adaptasikan dalam

kehidupannya. Belajar dengan model ini biasa disebut sebagai *self discovery learning*, yakni belajar melalui penemuan mereka sendiri. Lalu apa peran guru dalam konteks ini? Sally lebih jauh mengemukakan, bahwa pengajar harus mampu menjelaskan tugas apa yang harus siswa lakukan, apa tujuan dari tugas yang diberikannya itu, lalu kemana mereka harus mencari informasi, dan bagaimana mereka mengolah informasi tersebut, membahasnya dalam kelas, sampai mereka mempunyai kesimpulan yang sudah dibahas dalam kelompoknya masing-masing. Dalam proses pembahasannya itu, guru terus memberikan bimbingan dan arahan.¹⁹

Sedangkan *collaborative learning* adalah proses pembelajaran yang dilakukan bersama-sama antara guru dengan siswanya. Guru pada hakikatnya adalah pembelajar senior yang harus mentransformasikan pengalaman belajarnya pada pembelajar junior. Guru harus membantu berbagai kesulitan yang dihadapi oleh para pembelajar junior. Demikian pula antara siswa dengan siswa lainnya. Dalam konteks ini, *peer teaching* atau tutorial sebaya menjadi bagian penting, yang keuntungannya tidak semata untuk yang diajari tetapi juga untuk yang mengajari, karena siswa yang mengajari temannya akan semakin matang penguasaannya, sementara siswa yang diajari akan memperoleh bantuan teman sebayanya dalam proses pemahaman bahan ajar yang mereka pelajari. Inilah hakikat dari *collaborative learning*, yakni belajar yang saling membantu antara guru dengan siswa, dan antara siswa dengan siswa.

Sementara itu, Jerry Aldridge dan Renitta Goldman merekomendasikan bahwa untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk peningkatan hasil belajar, seorang guru harus mengembangkan berbagai perlakuan sebagai berikut:

- a. Guru harus mampu menciptakan situasi kelas yang tenang, bersih, tidak *stress*, dan sangat mendukung untuk pelaksanaan proses pembelajaran.
- b. Guru harus menyediakan peluang bagi para siswa untuk mengakses seluruh bahan dan sumber informasi untuk

¹⁹ Sally Phillips, Opportunities and Responsibilities; Competence, Creativity, Collaboration, and Caring, dalam John K. Roth, 'Inspiring Teaching', Anker Publishing Company, USA, 1997, h. 80-81.

- belajar.
- c. Gunakan model *cooperative learning* (belajar secara kooperatif) yang tidak hanya belajar bersama, namun saling membantu satu sama lain melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil, debat atau bermain peran. Biarkan siswa untuk berdiskusi dengan suara keras dalam kelompoknya masing-masing, dan biarkan siswa saling membantu satu sama lain, serta saling bertukar informasi yang mereka dapatkan dari hasil akses informasinya.
 - d. Hubungkan informasi baru pada sesuatu yang sudah diketahui oleh siswa, sehingga mudah dipahami oleh mereka.
 - e. Dorong siswa untuk mengerjakan tugas-tugas penulisan makalahnya dengan melakukan kajian dan penelusuran pada hal-hal baru dan dalam kajian yang mendalam.
 - f. Guru juga harus memiliki catatan-catatan kemajuan dari semua proses pembelajaran siswa, termasuk tugas-tugas individual dan kelompok mereka dalam bentuk portofolio.²⁰

Lima dari enam poin di atas adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan guru bersama manajemen sekolahnya, dan semua terkait dengan penyiapan proses pembelajaran siswa, yang memberi peluang mereka mencapai penguasaan dalam batas *mastery learning*, yakni penguasaan minimal 80% atau skor ideal lainnya dari bahan ajar yang diberikan. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah: penyiapan kelas yang mendukung terhadap proses pembelajaran efektif, bersih, sejuk dan menyenangkan, penyiapan sarana sumber belajar baik berupa perpustakaan, internet, laboratorium maupun koleksi-koleksi buku lainnya yang disiapkan di setiap kelas, serta guru menyiapkan penugasan pada siswa yang harus dikoordinasikan dengan manajemen sekolah, agar tidak terlalu banyak dan membebani di luar kapasitas siswa, serta guru harus mempunyai portofolio siswa, yakni catatan-catatan proses dan progres siswa selama dalam masa studinya dengan dia.

Sedangkan strategi pembelajaran yang ditawarkannya adalah *cooperatif learning*, yang menurut Kauchak lebih efektif dari pada *groupwork*. *Groupwork* adalah sebuah proses pembelajaran yang memberi kesempatan pada semua siswa untuk terlibat dalam kelompoknya dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. Untuk itu, guru harus merencanakan proses pembelajaran ini dengan seksama, karena kalau tidak dia akan kehilangan banyak waktu untuk proses di luar pembelajaran. Kemudian, guru juga harus:

- a. Memberitahu siswa tentang tugas siswa secara kelompok berikut mobilitas siswa dalam kelompoknya.
- b. Mempersiapkan siswa sampai mereka siap semuanya untuk melakukan proses pembelajaran dengan pelaksanaan tugas dalam kelompoknya.
- c. Masing-masing siswa memiliki penjabaran tugas yang jelas dalam kelompoknya.
- d. Beri siswa batas waktu yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.
- e. Perintahkan siswa untuk masing-masing menyelesaikan tugasnya serta semua menyelesaikan tugas kelompoknya.²¹

Strategi kerja kelompok ini merupakan salah satu dari bentuk implikasi aliran *constructivisme* yang menekankan pembelajaran interaktif, dan bisa dikembangkan dalam beberapa bentuk *group work*, yakni kerja kelompok yang masing-masing anggota memiliki tugas dalam kelompoknya, dan mereka saling memeriksa pekerjaan temannya. Kemudian bisa dikembangkan dengan kombinasi antara dua kelompok kecil tersebut, sehingga semakin besar dan semakin banyak masukan pada masing-masing, dengan harapan tingkat penguasaan siswa terhadap bahan ajarnya menjadi sempurna atau mendekati sempurna.

Sedangkan *cooperative learning* adalah belajar yang dilakukan bersama, saling membantu satu sama lain, dan mereka telah menyepakati tujuan atau kompetensi yang akan dicapai, masing-masing memiliki akuntabilitas individual, dan masing-masing harus mempunyai kesempatan

20 Jerry Aldridge and Renitta Goldman, *Current Issues and Trends in Education*, Allyn and Bacon, Boston, USA, 2002, h. 93.

21 Donald P. Kauchak and Paul D Eggen, *Learning and Teaching, Research Based Methods*, Allyn and Bacon, Boston, 1998, h. 196.

yang sama untuk mencapai sukses. Dalam *cooperative learning* itu dikembangkan tujuan kelompok, yang menuntut kesamaan harapan, kesamaan strategi dan kebersamaan dalam pencapaian target penguasaan kompetensi untuk setidaknya batas minimal penguasaan dalam kerangka *mastery learning*.²² Dalam pendekatan pembelajaran sekarang, seringkali siswa itu berkompetisi agar lebih dikenal dan diakui sebagai anak pintar dan baik oleh guru, agar memperoleh peringkat (*ranking*) terbaik. Dalam belajar kooperatif bukan kompetisi yang dikedepankan tetapi kebersamaan dan kerjasama serta saling membantu satu sama lain untuk mencapai keberhasilan masing-masing siswa dalam mencapai kompetensi ideal, yang pada akhirnya akan membentuk *image* kompetensi kelas. Itulah tujuan yang harus disepakati dalam kelompok dengan strategi *cooperative learning*.

Prinsip kedua dalam *cooperative learning* adalah akuntabilitas individual, yakni setiap peserta dalam kelompok harus memiliki tanggung jawab untuk menguasai semua bahan ajar yang dipelajari, dan siap untuk diuji dengan penguasaan minimal 80 %. Mereka harus sadar benar bahwa sebagai anggota kelompok harus mempelajari semua bahan ajar dengan baik, dan harus mampu menguasai semua bahan ajar tersebut. Jika tidak bisa memahami atau mengerjakannya, bisa bertanya pada teman kelompok, dan salah satu dari kelompok itu harus ada yang siap untuk menjadi tutor atau guru sebaya. Dengan demikian, mereka memiliki peluang yang sama untuk sukses. Dalam kelas yang menggunakan strategi *cooperative learning* tidak ada siswa yang lebih pintar antara satu dengan lain. Mereka tidak berkompetisi di antara sesama, tetapi mereka berkompetisi dengan hari kemarin. Mereka yang lebih cepat memahami bahan ajarnya, membantu mereka yang lambat, sampai mereka mencapai kompetensi yang sama. Kelebihan dari mereka yang lebih cepat dalam memahami bahan ajar, bisa menggunakan waktunya untuk aktivitas akademik lainnya, apakah penambahan informasi pelajaran melalui internet, bahan-bahan kepustakaan atau lainnya.

Pada akhirnya, kompetensi-kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik bisa

dicapai dengan berbagai strategi yang dapat melibatkan siswa dalam belajar, baik melalui *self discovery learning*, *group work*, *cooperative learning*, atau berbagai strategi lainnya yang dapat dikembangkan guru untuk membelajarkan siswa-siswanya. Mereka memiliki tujuan yang hendak mereka capai, guru memfasilitasi, dan semua siswa saling membantu untuk mencapai kompetensi yang mereka harapkan. Mereka tidak berkompetisi satu sama lain, tapi mereka berkompetisi dengan hari kemarin mereka sendiri. Itulah hakikat dari salah satu gagasan besar dalam reformasi pendidikan di Indonesia yang memiliki keinginan untuk mengembangkan proses pembelajaran dengan prinsip baru, *learning to do*, *learning to be*, *learning to learn*, dan *learning to live together*.

2. Kurikulum

Pendidikan multikultur, sebagaimana dilontarkan melalui proses diskursus kependidikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini di Indonesia, nampaknya para pemerhati pendidikan mengharapkan pengembangan fokus dan atau pengayaan pendidikan nilai yang lebih memberikan penghormatan terhadap hak-hak seluruh warga negara, dengan tidak membedakan ras, agama, budaya dan warna kulit, dan tanpa mengurangi hak-haknya itu termasuk untuk kelompok minoritas yang mungkin tidak terwakili dalam lembaga-lembaga pemerintahan, apakah lembaga legislatif, ataupun lembaga birokrasi pemerintahan. Dengan demikian, pendidikan multikultural adalah pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada siswa sebagai calon warga negara, agar memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik, bisa hidup berdampingan dalam keragaman watak kultur, agama, dan bahasa, serta menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnik mayoritas atau minoritas, dan dapat bersama-sama membangun kekuatan bangsa sehingga diperhitungkan dalam percaturan global dan *nation dignity* yang kuat. Implementasi pendidikan multikultur pada jenjang pendidikan menengah, dapat dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan kewargaan dan/atau pendidikan agama. Pendidikan multikultural melalui pendidikan agama (Islam), dapat dilakukan

melalui pemberdayaan slot-slot kurikulum atau penambahan atau perluasan kompetensi hasil belajar dalam konteks pembinaan akhlak mulia dengan memberi penekanan pada berbagai kompetensi dasar sebagaimana telah terpapar di atas. Kemudian, pendidikan multikultur melalui pendidikan agama (Islam) juga harus dilakukan dalam pendekatan deduktif diawali dengan kajian ayat dalam tema-tema yang relevan, kemudian dikembangkan menjadi norma-norma keagamaan, baik norma hukum maupun etik.

Pendidikan multikultural, baik melalui Pendidikan Kewarganegaraan maupun Pendidikan Agama Islam, harus dilakukan secara komprehensif, dimulai dari desain perencanaan dan kurikulum melalui proses penyisipan, pengayaan dan/atau penguatan terhadap berbagai kompetensi yang telah ada, mendesain proses pembelajaran yang bisa mengembangkan sikap siswa untuk bisa menghormati hak-hak orang lain, tanpa membedakan latar belakang ras, agama, bahasa, dan budaya, dan tanpa membedakan mayoritas dan minoritas. Pencapaian pendidikan multikultur harus dapat diukur melalui evaluasi yang relevan, apakah melalui instrumen tes, non-tes atau melalui proses pengamatan longitudinal dengan menggunakan portofolio siswa.

Dengan mempertimbangkan inspirasi yang didorong oleh Will Kymlicka maka kompetensi standar yang diharapkan adalah menjadi warga negara yang mampu hidup berdampingan bersama warga negara lainnya tanpa membedakan agama, ras, bahasa, dan budaya, dengan menghormati hak-hak mereka, memberi peluang kepada semua kelompok untuk mengembangkan budayanya, serta mampu mengembangkan kerjasama untuk mengembangkan bangsa menjadi bangsa besar yang dihormati dan disegani di dunia internasional. Sesuai dengan kompetensi standar tersebut, maka dapat dikembangkan beberapa kompetensi dasar sebagai berikut:

- a. Menjadi warga negara yang menerima perbedaan-perbedaan etnik, agama, bahasa dan budaya dalam struktur masyarakatnya.
- b. Menjadi warga negara yang bisa melakukan kerjasama multietnik, multi

kultur, dan multireligi dalam konteks pengembangan ekonomi dan kekuatan bangsa.

- c. Menjadi warga negara yang mampu menghormati hak-hak individu warga negara tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa, dan budaya dalam semua sektor sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya, bahkan untuk memelihara bahasa dan mengembangkan budaya mereka.
- d. Menjadi warga negara yang memberi peluang pada semua warga negara untuk terwakili gagasan dan aspirasinya dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif.
- e. Menjadi warga negara yang mampu mengembangkan sikap adil dan mengembangkan rasa keadilan terhadap semua warga negara tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa dan budaya mereka.²³

Lima kompetensi dasar yang menjadi inti dalam pendidikan multikultur tersebut, tampaknya tidak bertentangan dengan norma hukum dan etik dalam ajaran Islam, atau pemikiran keagamaan yang dikemukakan para ulama, dan bahkan kini sudah teradopsi sebagai nilai-nilai bangsa yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam mengembangkan perilaku atau kebijakan yang akan melahirkan berbagai implikasi tindakan dalam kehidupan sosial. Kendati tidak diperintahkan secara tegas dalam teks kitab suci, tapi setidaknya sumber ajaran tersebut tidak melarang kerjasama dengan penganut agama lain dalam mengembangkan ekonomi dan kekuatan bangsa. Dengan demikian, posisi pendidikan multikultural dalam persepsi keagamaan akan sangat ditentukan oleh argumentasi rasional yang memperkuat daya dorong masuknya sikap pluralistik tersebut dalam citra sikap keberagaman umat Islam Indonesia.

Lima kompetensi dasar yang harus dikembangkan dalam pendidikan multikultur tersebut, pada akhirnya menuntut sikap toleran, yakni sikap untuk mengatur dan menyediakan

23 Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, New York, 2000, h. 153.

atau membiasakan diri untuk hidup dengan sesuatu yang tidak disukai, yang dilakukannya dalam rangka memelihara hubungan baik dengan yang lain. W. Paul Vogt selanjutnya menjelaskan, ada dua argumen tentang signifikansi pengembangan dan pembinaan sikap toleransi dalam hidup berdemokrasi dan menghargai HAM serta keadilan, yakni bahwa keragaman masyarakat merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Keragaman adalah sebuah realitas yang menjadi potensi sebuah bangsa. Namun potensi itu bisa menjadi sebuah kekuatan nyata bila mereka bisa bersatu, saling mencintai satu sama lain, saling berpelukan satu sama lain.²⁴ Untuk itulah mereka harus memahami pilihan-pilihan kultur dan keyakinan yang telah dianutnya. Keragaman etnik dan kultur di sebuah bangsa, selalu memberi peluang pada etnik dan budaya tertentu akan menjadi dominan dan mendominasi etnik serta kultur yang lain. Sikap tersebut menjadi pemicu konflik, ketika kelompok-kelompok lain kemudian bergerak menjadi sebuah kekuatan sosial. Oleh sebab itulah, kelompok etnik dan budaya yang kuat harus terus membina sikap toleran agar terhindari konflik dan memina kesatuan dan persatuan kelompok untuk membina sebuah kekuatan sosial.²⁵

Terkait dengan itu semua, maka pendidikan multikultural harus direncanakan dalam sebuah desain kurikulum yang integratif dan didukung dengan lingkungan serta struktur dan budaya sekolah yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap dan perilaku multikultur tersebut. Pendidikan multikultural, secara substantif harus bisa menjadi bagian integral dalam mata pelajaran *life skill*, seperti Pendidikan Kewarganegaraan atau Sejarah, dan/ atau pendidikan nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Tema-tema multikultur harus disajikan secara sekuentif dalam *scope* yang komprehensif dalam upaya mencapai berbagai kompetensi yang disepakati antara sekolah, pelanggan dan pemakai lulusan.

Di samping itu, interaksi anak atau siswa dengan guru, kepala sekolah, dan pegawai administrasi, juga merupakan pengalaman-pengalaman kultural yang bisa menjadi bagian

produktif atau kontraproduktif terhadap pengembangan sikap multikultur pada siswa. James A. Banks menegaskan bahwa interaksi siswa dengan guru dan sesama siswa dalam kelas, merupakan bagian-bagian proses pembelajaran yang sangat kuat kontribusinya dalam pengembangan sikap siswa.²⁶ Seorang guru yang memberikan kebijakan berbeda pada siswanya, apakah karena faktor jender, ekonomi, etnik, budaya, atau agama, akan merupakan tindakan-tindakan yang sangat tidak produktif terhadap proses pembinaan sikap multikultur, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan jender (*gender equity*), dan bertentangan pula dengan prinsip-prinsip HAM dan demokratisasi. Demikian pula, layanan kepala sekolah dan bagian administrasi sekolah tidak boleh ada sikap membedakan karena faktor-faktor perbedaan di atas.

3. Guru

Sebaik-baik konsep untuk pendidikan multikultural yang integratif, tidak akan terlalu bermakna jika dikelola dan dikendalikan oleh guru yang tidak cukup kompeten untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut, baik dalam wilayah kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Oleh sebab itu, ada beberapa kualifikasi guru yang diperlukan dalam konteks pengembangan pembelajaran multikultural, yakni:

- a. Guru harus memiliki *skill* keguruan, pemahaman, pengalaman, dan nilai-nilai kulturalnya dengan baik, sehingga dapat memahami siswa-siswanya yang secara etnik, ras, dan kultur berbeda dengan mereka, serta dapat menerima para siswanya dalam kelas untuk bisa belajar bersama, mengembangkan aktivitas belajar secara bersama-sama di dalam kelasnya.
- b. Kemudian guru juga harus selalu merefleksikan dirinya sendiri, apakah mereka sudah bisa memberikan sikap dan perlakuan yang adil terhadap seluruh siswanya yang berbeda latar belakang etnik, ras, dan budayanya, dan apakah mereka juga telah memberikan perlakuan yang sama terhadap para

²⁴ Paul W. Vogt, *Tolerance and Education, Learning to Live with Diversity and Difference*, Sage Publication, London, 1997, h. 1.

²⁵ *Ibid*, h. 6.

²⁶ James A. Banks, *Educating Citizens in a Multicultural Society*, Teacher College Press, Columbia University, New York, 1997, h. 82.

- siswa yang berbeda jenis kelaminnya.
- c. Pendidikan multikultur harus dilakukan secara dinamis. Oleh sebab itu guru diharapkan memperkaya pemahamannya tidak hanya soal kejuruan dan pembelajaran, tapi juga pengetahuan-pengetahuan konseptual tentang multikultur, seperti budaya, imigrasi, ras, seks, asimilasi kultur, gap etnik, stereotip, prejudasme, dan rasisme.
 - d. Di samping itu, guru juga harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah, karakteristik dan perbedaan-perbedaan internal dalam masing-masing kelompok etnik dan ras-ras tertentu.
 - e. Terakhir guru juga harus mampu melakukan analisis-analisis perbandingan dan mampu mengambil sebuah kesimpulan tentang teori-teori yang dapat digunakan untuk mengelola karagaman sosial, sehingga menjadi potensi yang kuat untuk bangsa.²⁷

D. Penutup

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera. Mengingat kenyataan seperti ini, menjadi penting untuk mengembangkan pendidikan multikultural, yakni sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional.

Dalam hal pendidikan multikultural, sekolah harus mendesain proses pembelajaran, mempersiapkan kurikulum dan desain evaluasi, serta mempersiapkan guru yang memiliki persepsi, sikap dan perilaku multikultur, sehingga menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap multikultur para siswanya.

Daftar Pustaka

- Aldridge, Jerry and Renitta Goldman, *Current Issues and Trends in Education*, Allyn and Bacon, Boston, USA, 2002.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Multikultural; Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika*, dalam Tsaqafah, Vol. I, No. 2, 2003.
- Banks, James A, *Educating Citizens in a Multicultural Society*, Teacher College Press, Columbia University, New York, 1997.
- Budianta, Melani, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural, Sebuah Gambaran Umum*, dalam Tsaqafah, Vol. I, No. 2, 2003.
- Kauchak, Donald P and Paul D. Eggen, *Learning and Teaching, Research Based Methods*, Allyn and Bacon, Boston, 1998.
- Kymlicka, Will, *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, New York, 2000.
- Moore, Kenneth D, *Classroom Teaching Skill*, McGraw Hill, New York, 2001.
- Phillips, Sally, *Opportunities and Responsibilities; Competence, Creativity, Collaboration, and Caring*, dalam, John K Roth, 'Inspiring Teaching', Anker Publishing Company, USA, 1997.
- Sunarto, Kamanto, Multicultural Education in Schools, Challenges in its Implementation, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004.
- Sada, Clarry, Multicultural Education in Kalimantan Barat; an Overview, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004.
- Semiawan, Conny, The Challenge of a Multicultural Education in a Pluralistic Society; the Indonesian Case, dalam *Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, Edisi I, 2004.
- Tilaar, H.A.R., *Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Vogt, Paul W, *Tolerance and Education, Learning to Live with Diversity and Difference*, Sage Publication, London, 1997.

²⁷ Ibid, hal. 85-86.